

Peran Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) Di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Yunita,

Isna Fitria Agustina

Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

September , 2023



Pendahuluan

Usaha kecil dan non-formal merupakan salah satu sektor komersial yang telah menunjukkan peran strategis atau signifikan dalam mengurangi dampak krisis ekonomi 1997 yang mempengaruhi Indonesia. (Putra, 2016). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak utama kewirausahaan di tanah air. UMKM sangat penting untuk menurunkan pengangguran, menciptakan lapangan kerja, memberantas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan menumbuhkan rasa identitas nasional (Ariani, 2013). Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini dipertegas dengan penjelasan pada Pasal 33 bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran individual.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Usaha mikro adalah perusahaan yang menguntungkan yang dimiliki oleh orang atau badan lain yang sesuai dengan definisi usaha perseorangan. Usaha kecil adalah usaha yang sukses secara ekonomi yang beroperasi secara mandiri dan dijalankan oleh orang atau organisasi yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha yang dimiliki, dikendalikan, atau diintegrasikan secara langsung atau tidak langsung ke dalam usaha menengah atau besar. Bisnis menengah adalah operasi ekonomi otonom atau entitas komersial yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dan yang memiliki aset bersih atau total penjualan yang termasuk dalam definisi hukum bisnis kecil dan bisnis besar dan diatur didalam undang-undang.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana peran Pemerintahan Desa dalam peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo?
2. Apa saja faktor-faktor yang penghambat dari peran Pemerintahan Desa dalam peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo?

Metode

- Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Metode kualitatif ini memiliki karakteristik yang bersifat deskripsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah *field research* (penelitian lapangan).
- Fokus dalam penelitian ini yaitu menganalisis dan mendeskripsikan peran Pemerintahan Desa dalam peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, serta menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat dari peran Pemerintahan Desa dalam peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.
- Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, dalam penelitian ini informan yang dipilih antara lain, Kepala Desa Kedungrejo, Sekretaris Desa Kedungrejo, 2 (dua) masyarakat pelaku Usaha UMKM kerupuk, dan 2 (dua) masyarakat yang beralih profesi dari UMKM kerupuk. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dokumentasi serta studi literatur. Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah tipe analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman (2014:20) yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

Peran pemerintah menurut Gede Diva, dalam pengembangan UMKM peran pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan dengan tiga faktor utama, yakni regulator, fasilitator, katalisator.

1. Peran pemerintah sebagai fasilitator bagi pelaku UMKM kerupuk dapat dikatakan hanya memberikan fasilitas dari segi administratif saja. Pemberian fasilitas dalam segi pelatihan keahlian dan pemberian bimbingan teknologi, umumnya dilakukan oleh pihak ketiga, seperti; peserta KKN dari universitas-universitas disekitar Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon, lembaga swadaya masyarakat yang memiliki program kerja untuk meningkatkan UMKM yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini disebabkan oleh ketakutan masyarakat UMKM kerupuk terhadap persaingan harga sesama UMKM kerupuk di Desa Kedungrejo, sehingga fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah desa dihapuskan seperti pengadaan Bumdes dan Koperasi. Akibatnya adalah pemerintah Desa Kedungrejo hanya memberika fasilitas administratif berupa pemberian surat izin mendirikan usaha dan pemberian fasilitas berupa penyediaan tempat pelatihan maupun bimbingan teknologi.
2. Peran pemerintah sebagai regulator dalam segi kebijakan, pemerintah Desa Kedungrejo menggunakan kebijakan yang sudah ada antara lain; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah; Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Penggunaan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini sebagai acuan untuk peraturan bagi pelaku UMKM kerupuk di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon. Hal ini meminimalisir adanya ketimpangan maupun miskomunikasi terkait pelaksanaan pemberdayaan UMKM di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon. Terkait hal tersebut, pemerintah Desa Kedungrejo kecamatan Jabon tidak memiliki atau membuat kebijakan khusus bagi pelaku UMKM kerupuk Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon.
3. Peran pemerintah sebagai kasalitor dalam pengembangan dan peningkatan UMKM tentunya dibutuhkan adanya peran pemerintah sebagai percepatan peningkatan UMKM, namun hal tersebut belum ada didalam peran pemerintah Desa Kedungrejo. Peran sebagai katalisator di Desa Kedungrejo belum berjalan dengan baik, dan hal ini berdampak pada masyarakat UMKM kerupuk di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon terutama pada hal pengembangan dan peningkatan keterampilan masyarakat UMKM dan juga penyediaan sarana dan prasarana serta perbantuan modal usaha bagi UMKM kerupuk di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon. Penyediaan informasi terkait UMKM pun terkesan cukup lambat sehingga berdampak pula pada penentuan harga jual kerupuk hasil produksi masyarakat UMKM kerupuk Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon.

Pembahasan

Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) Di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo

1. Faktor pendukung adalah faktor yang mendukung, mengajak, dan bersifat untuk ikut serta dalam mendukung suatu kegiatan, faktor pendukung peran pemerintah desa dalam UMKM kerupuk di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon yaitu adanya pihak ketiga dalam peningkat UMKM kerupuk yakni dengan menggunakan media sosial yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi yang sedang melaksanakan KKN di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon. Melalui media sosial para pelaku UMKM bisa mengembangkan bisnisnya secara luas. Media sosial mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk saat ini terhadap kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh kecepatan penerimaan informasi lewat internet. Dengan akses yang mudah dan cepat maka media sosial dimanfaatkan oleh para pengusaha kecil UMKM untuk lebih berani mempromosikan produknya.

2. Faktor penghambat adalah faktor yang sifatnya menghambat jalannya suatu kegiatan dan bersifat seperti menggagalkan suatu hal. Faktor yang mempengaruhi perkembangan UMKM dilihat dari kondisi UMKM saat ini. Hambatan-hambatan tersebut bisa berbeda disatu daerah dengan daerah lainnya atau antara pedesaan yang perkotaan, antar sektor atau antar sesama perusahaan di sektor yang sama masalah tersebut antara lain: 1) Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha. Kemampuan manajerial para pelaku UMKM perlu ditingkatkan. Begitupun sistem kadrisasi perlu dibangun. Sering kali dijumpai UMKM hanya *one man show*, sehingga dibutuhkan tim solid yang mampu mewarisi UMKM dari pendirinya. 2) Kemampuan pemasaran yang terbatas. Meskipun media online telah berkembang, akan tetapi media ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM. 3) Akses informasi usaha yang masih rendah. 4) Belum berjalain kemitraan yang baik yang saling menguntungkan antar pelaku UMKM, Usaha besar, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 5) Masyarakat atau pelaku UMKM masih belum menggunakan fasilitas dengan baik yang berupa Koperasi dan Bumdes yang diberikan pemerintah Desa yang untuk bertujuan memajukan usaha UMKM kerupuk yang ada di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon.

Temuan Penting Penelitian

Pada masyarakat selaku pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Kerupuk di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo kurang merasakan manfaat atau efisien dari peran pemerintah Desa Kedungrejo terhadap peningkatan Usaha Mikro, Kecil Dan Mengah (UMKM)

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi publik yang berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, dan dapat digunakan sebagai acuan referensi terhadap penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengembangan UMKM.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas sebagai bahan referensi dan sebagai literatur. Apabila terdapat kekurangan dalam penelitian dapat ditindaklanjuti ke penelitian berikutnya yang berhubungan dengan tema yang sama.
- b. Bagi Penulis dapat menambah wawasan terutama yang berkaitan dengan sosial ekonomi mengenai peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui Usaha Mikro, kecil dan Menengah.
- c. Bagi Pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi kepada pemerintah dalam hal mengenai peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.

Kesimpulan

Peran Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) Di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dapat disimpulkan sebagai berikut: a) Peran pemerintah desa sebagai fasilitator, dalam hal ini pemerintah Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo hanya memfasilitasi pelaku UMKM kerupuk dalam bidang administratif dan penyediaan tempat yang digunakan sebagai tempat pelatihan dalam meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakat UMKM Desa Kedungrejo maupun sosialisasi yang dilakukan oleh pihak ketiga baik dari Universitas – Universitas maupun sosialisasi terkait permodalan oleh beberapa Bank yang ada di Kabupaten Sidoarjo; b) Peran pemerintah desa sebagai regulator, dalam hal ini pemerintah Desa Kedungrejo dalam meningkatkan UMKM kerupuk di desanya menggunakan kebijakan yang telah berlaku; c) Peran pemerintah desa sebagai katalisator, dalam hal ini peran pemerintah desa sebagai katalisator dalam meningkatkan UMKM di Desa Kedungrejo belum bisa dikatakan baik, hal ini disebabkan pemerintah Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo kurang aktif dalam memberikan informasi terkait penyediaan sarana dan prasarana serta pemberian modal usaha bagi UMKM kerupuk Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo serta belum memiliki program khusus dalam percepatan peningkatan UMKM di Desa Kedungrejo namun Pemerintah Desa Kedungrejo berusaha sebaik mungkin dalam kepengurusan NIB bagi pelaku UMKM Desa Kedungrejo, sejauh ini baru 5 pelaku UMKM Desa Kedungrejo yang sudah memiliki NIB.

Faktor pendukung dalam Peran Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) Di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo adanya bantuan dari pihak ketiga dalam mensosialisasi penggunaan media sosial dalam meningkatkan penjualan produk UMKM kerupuk Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. sementara itu, hambatan dalam Peran Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) Di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo yaitu masih rendahnya kemampuan SDM pelaku UMKM kerupuk Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dalam manajerial terhadap UMKM yang dijalankannya, selain itu kurangnya timbal balik yang diterima pemerintah Desa Kedungrejo atas disediakannya Koperasi dan Bumdes dikarenakan takutnya akan persaingan antar pelaku UMKM kerupuk Desa kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

Referensi

- H. Putra, "Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora," *Jurnal Andisa Sosiologi*, vol. V, no. 2, pp. 40-52, 2016.
- Ariani and M. N. Utomo, "KAJIAN STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA TARAKAN," *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, vol. XIII, no. 12, pp. 99-116, 2017.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 1 Tentang Perekonomian
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 35 Tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah
- Administrator, "Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah," KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, 01 Oktober 2021. [Online]. Available: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>. [Accessed 25 Agustus 2022].
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Administrator, "Jumlah dan Distribusi Penduduk," Badan Pusat Statistik, 31 Desember 2020. [Online]. Available: <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>. [Accessed 25 Agustus 2022].
- Administrator, "Data UKM," Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, 31 December 2020. [Online]. Available: <https://diskopukm.jatimprov.go.id/info/data-ukm>. [Accessed 25 Agustus 2022].
- Peraturan Daerah Jawa Timur No. 4 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- D. Gede, *Mengembangkan UMKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah*, Jakarta: Bakrie School of Management, 2009.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- M. Winartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta, 2006
- M. Suldana and Huberman, *Qualitative Data Analysis*, America: Sage Publications, 2014
- N. Elsyra and S. Rusnaini, "PERAN PEMERINTAH DUSUN DALAM PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DILEMBAH KUAMANG KABUPATEN BUNGO," *Khazanah Ilmu Berazam*, vol. I, no. 2, pp. 26-32, 2018.
- C. Ondang, F. Singkah and N. Kumayas, "PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN MINAHASA (SUATU STUDI DI DINAS KOPERASI DAN UKM)," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, vol. III, no. 3, pp. 1-10, 2019.
- J. Sunaryo, S. Rusnaini and S. A. Albadriy, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembinaan Home Industry Sale Pisang Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi pada Dusun Purwo Bakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo)," *Jasiora*, vol. III, no. 2, pp. 61-67, 2019.

